

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alan R, Ball dan B Guy Peters. 2010. sebagaimana dikutip oleh Saldi Isra, pergeseran fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Raja Wali Pers. Jakarta.
- Asshidiqy, Jimly. 2008. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis. Sekeretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Buana Ilmu. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Konstitusi Pers. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Konstitusi Press. Jakarta.
- Bangun, Budi Hermawan. 2004. Jaminan Perlindungan Ham dalam Konstitusi (Bag. 1). Varia Bina Civika No. 62 Tahun XVIII Mei 2004. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Ghafur, Jamaludin dan Allan Fatchan Gani Wardhani. 2019. Presidential Threshold: Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia. Malang.
- Goodwin-Gil, Guy S. 1994. Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional. Pirac dan The Asia Foundation. Jakarta.

- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu. Surabaya.
- Hamidi, Jazim, dkk. 2009. Teori dan Politik Hukum Tata Negara. Total Media. Yogyakarta.
- Haris, Syamsuddin, Ramlan Surbakti, Saldi Isra, Ikrar Nusa Bakti, dkk. 2014. Pemilu Nasional Serentak 2019 (Position Paper). Electoral Institute LIPI. Jakarta.
- Harman, Benny K. 2013. Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran dan Pengujian UU terhadap UUD. KPG. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Husein, Harun. 2013. Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan UU Nomor 8 Tahun 2012. Perludem. Jakarta.
- Hermawan, Erman. 2001. Politik Membela yang Benar, Teori Kritik dan Nalar. Garda Bangsa. Jakarta.
- Imam, Soebechi. 2016. Hak Uji Materiil. Sinar Grafika. Jakarta.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). 2002. Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu. International IDEA. Jakarta.
- Kherid, M. Nizar. 2021. Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum. Rayyana Komunikasindo. Jakarta Timur.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

- Kusnardi, Moh. Dan Harmaily Ibrohim. 1988. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti. Jakarta.
- Labolo, Muhadam, dkk. 2015. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep, dan Isu Strategis). PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Noor, Firman. 2009. Menimbang Masa Depan Sistem Presidensial di Indonesia: Problematika Demokrasi dan Kebutuhan Perbaikan Sistemik. dalam Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bakti (penyunting). sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal. Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Yogyakarta.
- Riyanto, Astim. 2000. Teori Konstitusi. Yapemdo. Bandung.
- Sitabuana, Tundjung Herning. 2020. Hukum Tata Negara Indonesia. Konstitusi Press.
- Santoso, Topo, dan Ida Budhiarti. 2019. Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan pengawasan. Jakarta.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiarti. 2019. Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan pengawasan. Jakarta.
- Santoso, Topo. 2006. Tindak Pidana Pemilu. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Supriyanto, Didik. 2015. Pemilu Serentak Versi MK Justru Merepotkan, Pengantar dalam Indra Pahlevi (edt). Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. Jakarta.
- Supriyanto, Didik dan August Mellaz. 2011. Ambang Batas Perwakilan. Perludem, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2014. Metode Penelitian Hukum. Alfabeta. Bandung.

Utomo, A. Himmawan. 2007. “Konstitusi”, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran. Kanisius. Yogyakarta.

JURNAL

Al-Fatih, Sholahuddin. 2019. Akibat Hukum Regulasi tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden. Vol. 12 Nomor 1. Jurnal Yudisial.

Ansori, Lutfil. 2017. Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019. Vol. 4 Nomor 1. Jurnal Yuridis.

Entah, Aloysius R. 2016, Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, Seminar Nasional Hukum, Vol. 2 Nomor 1.

Ghoffar, Abdul. 2018. Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain. Jurnal Konstitusi. Vol. 15. Nomor 3.

Kartawidjaja, Pipit R. 2016. memperkuat sistem presidensialisme Indonesia (kumpulan paper). Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Jakarta.

Mu'allifin, M. Darin Arif. 2016. Hubungan Konstitusi dengan Tugas dan Fungsi Negara. Vol. 4. Nomor 1. AHKAM.

Peaslee, Amos J. , 1950. Constitutions of Nation. Vol. I. Concord. The Rumford Press. New Heaven.

Sukriono, Didik 2009. Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Vol. 2 Nomor 1. Jurnal Konstitusi.

KARYA TULIS ILMIAH

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Gagasan Negara Hukum Indonesia.

Mifthary, Desty. 2019. "Kajian Yuridis Terhadap Sistem *Presidential Threshold* Sebagai Syarat Untuk Mengusung Calon Presiden". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Raditya, Igusti Ngurah Agung Sayoga. 2013. Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold) dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia. Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar.

INTERNET

Kemendikbud. 2022. KBBI Daring: ambang batas, melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>, di akses pada tanggal 22 Januari 2022.

FFS. 2021. *Presidential Threshold* Hasilkan Polarisasi dan Disharmoni Sosial, melalui <https://www.beritasatu.com/politik/853885/presidential-threshold-hasilkan-polarisasi-dan-disharmoni-sosial>, di akses pada tanggal 18 Mei 2022.

Haris, Syamsuddin. 2013. Salah Kaprah *Presidential Threshold*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). melalui <http://lipi.go.id/berita/single/SALAH-KAPRAH-PRESIDENTIAL/7896>, di akses pada tanggal 12 April 2022.

Maharani, Tsarina. 2022. MK Putus 21 Perkara Uji Materi "*Presidential Threshold*" dalam 5 Tahun, 17 Tak Diterima. Kompas.com. melalui <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/25/17405191/mk-putus-21-perkara-uji-materi-presidential-threshold-dalam-5-tahun-17-tak?page=all>, di akses pada tanggal 13 April 2022.

VIVA.co.id. 2019. Jumlah Golput di Pilpres 2019 Dikalim Paling Rendah Sejak 2004. Melalui <https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1145324-jumlahgolput-di-pilpres-2019-diklaim-paling-rendah-sejak-2004>.

Supriyanto, Didik. 2017. Undang-Undang Pemilu: Kemalasan dan Kepentingan. Melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/12422511/obesitas-undang-undang-pemilu-kemalasan-dan-kepentingan?page=all>, di akses pada tanggal 27 Maret 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.